

GPM BETHEL DOBO DALAM KANCAH REALITA DEMOKRASI DI INDONESIA

(Sebuah tinjauan teologis atas sikap serta keterlibatan jemaat GPM Bethel Dobo dalam memaknai demokrasi melalui proses Pilkada bulan Desember 2015)



Disusun oleh:

Sipra Mariana Gutandjala

NIM: 01120026

Dosen Pembimbing:

Pdt Paulus Sugeng Widjaja, MAPS., Ph.D

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul

GPM BETHEL DOBO DALAM KANCAH REALITA DEMOKRASI DI INDONESIA

(Sebuah tinjauan teologis atas sikap serta keterlibatan jemaat GPM Bethel Dobo dalam memaknai demokrasi melalui proses Pilkada bulan Desember 2015)

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

SIPRA MARIANA GUTANDJALA

01120026

Dalam Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Teologi

Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains Teologi pada tanggal 16 Januari 2017

Nama Dosen

1. Pdt Paulus Sugeng Widjaja, MAPS., Ph.D
(Dosen Pembimbing/Penguji)
2. Pdt. Prof. Dr. (h.c) E. Gerrit Singgih, Ph.D
(Dosen Penguji)
3. Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanussa, M.Th
(Dosen Penguji)

Tanda Tangan



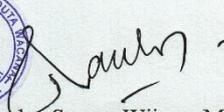
Yogyakarta, 16 Januari 2017

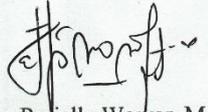
Disahkan oleh

Dekan

Ketua Program Studi S-1




Pdt. Paulus Sugeng Wijaya, MAPS, Ph.D


Pdt. Jeniffer Fresy Ponielly Wowor, M.A.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

GPM BETHEL DOBO DALAM KANCAH REALITA DEMOKRASI DI INDONESIA

(Sebuah tinjauan teologis atas sikap serta keterlibatan jemaat GPM bethel Dobo dalam memaknai demokrasi melalui proses Pilkada bulan Desember 2015)

Disusun Oleh :

Sipra Mariana Gutandjala

NIM: 01120026

Telah dinyatakan layak untuk diuji ujian skripsi

Di Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Yogyakarta, 4 Januari 2017

Dosen Pembimbing:

Pdt Paulus Sugeng Widjaja, MAPS., Ph.D

Kata Pengantar

“In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with succes (Proverbs 3:6)”. Salah satu ayat yang menjadi favorit juga memberikan energi yang hidup bagi penulis dalam mengerjakan segala hal dalam hidup. Karena itulah penulis mengerti bagaimana menghargai usaha, proses serta bagaimana mensyukuri segala sesuatu bahkan jika situasi yang dialami adalah situasi sulit sekalipun. Sebab Dia berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kekasihNya berjalan sendiri menyusuri tajamnya kerikil kehidupan. Dia berjalan bersama dan tanpa Dia, proses penulisan skripsi dengan judul “GPM Bethel Dobo dalam Kancan Realita Demokrasi di Indonesia” ini tidak akan terselesaikan.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Kristen Duta Wacana. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya dosen pembimbing, Segala hambatan yang Penulis alami dapat ditangani dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki Penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan sebab kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Karena itu penulis akan sangat bersyukur kalau-kalau ada saran atau kritik yang membangun serta memperkaya pemahaman penulis untuk lebih peka dalam melihat kompleksitas persoalan jemaat khususnya dalam bidang politik kemudian tergerak hati untuk memberikan kontribusi melalui segala bentuk pelayanan yang dibutuhkan oleh jemaat GPM Bethel Dobo dalam menghadapi gejolak atau dinamika politik yang berkembang setiap saat.

Selanjutnya penulis juga menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini penulis tentu tidak melakukannya sendiri. Penulis banyak dibimbing oleh banyak pihak. Karena itu dengan hati yang tulus penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Mama Ecy dan Papa Memet, yang dengan penuh ketulusan, kesabaran dan cinta tidak pernah menyerah kepada penulis. Dua orang yang selalu hadir dalam setiap situasi yang penulis alami baik cerah, panas, mendung bahkan hujan sekalipun. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih telah “menyulap” penulis ke dunia yang indah ini. I’m nothing without you gengss!! Deep Love ma pa
2. Seluruh dosen serta pegawai Fakultas Teologi UKDW yang senantiasa melayani dan dengan kasih membekali penulis dengan ilmu pengetahuan
3. Bapak pembimbing, Pdt Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D yang di tengah berbagai kesibukannya, beliau senantiasa dengan kasih membimbing, mengarahkan, mengkritik dan memberi saran dalam proses penulisan skripsi yang dilakukan penulis
4. Bapak dosen wali, Pdt Wahyu Nugroho yang dengan kebaikannya bersedia mendengarkan keluh kesah anak walinya, memberikan dukungan, mendoakan dan peduli kepada anak walinya.

5. Juga kepada 3 belahan jiwa penulis : Stela, Instituta dan Maria yang terus membantu penulis untuk menjadi seorang kakak. Terima kasih untuk terlahir sebagai adik dalam kehidupan penulis. Kalian adalah alasan utama kakak untuk berjuang sampai saat ini dan seterusnya
6. Juga kepada Oma Tesy, Oma Mariana, Opa Ulis dan sanak saudara yang senantiasa mendukung penulis dalam doa
7. Keluarga besar Wonderful Garden 2012. Terima kasih untuk menjadi keluarga penulis di kota pelajar ini.
8. Then to my unbiological sister, my babeh blond Ulina Ginting, Thank you for being you! (xx)
9. Kakak Terkasih Heidy Didy yang selalu menyemangati penulis dalam mencintai setiap proses kehidupan. Juga “kadang” sangat setia mendengarkan keluhan penulis selama proses penulisan skripsi ini
10. Rizma Leunupun. Just wanna say I love you and your mind
11. Kota Yogyakarta yang memberikan kehangatan dan kehidupan kepada penulis
12. Dan kepada semua pihak Gereja Bethel Dobo, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam dalamnya atas bantuan berupa sharing pemahaman, ide-ide menarik yang sangat membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini nantinya bermanfaat dalam memperkaya pemahaman jemaat Bethel Dobo tentang makna demokrasi serta membantu gereja dan warganya dalam menghayati panggilan pelayanannya di tengah kompleksitas persoalan dalam masyarakat.

Yogyakarta, 4 Januari 2017

Sipra M Gutandjala

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	viii
Pernyataan Integritas.....	xi
Daftar Isi.....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Permasalahan dan Pembatasan Masalah	12
1.3 Judul Skripsi dan Alasan Pemilihan Judul	12
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1.5 Metodologi Penelitian	14
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	16
2.1 Relasi Gereja dan Politik.....	18
2.2 Perjalanan Demokrasi Dalam Realita Politik di Indonesia.....	24
2.3 Demokrasi Sebagai Misi Gereja.....	33
BAB III PENJELASAN KONTEKS JEMAAT GPM BETHEL DOBO dan HASIL PENELITIAN TERKAIT PEMAHAMAN JEMAAT GPM BETHEL DOBO TENTANGMAKNADEMOKRASI.....	32
3.1 Konteks Geografis Kabupaten Kepulauan Aru	36
3.2 Konteks Masyarakat Aru.....	38
3.3 Konteks GPM Bethel Dobo.....	39
3.4 Hasil Penelitian Terkait Pemahaman Jemaat GPM Bethel Dobo Tentang Makna Demokrasi, Melalui Keterlibatan Jemaat Pada Pilkada Desember 2015.....	49

BAB IV GPM BETHEL DOBO DAN DEMOKRASI.....	48
4.1 Demokrasi Menurut Kacamata Kristiani.....	66
4.2 GPM Bethel Dobo dan Realita Demokrasi.....	73
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
Daftar Pustaka.....	74
Lampiran-Lampiran.....	76

© UKDW

Abstrak

Pemahaman jemaat GPM Bethel Dobo akan makna demokrasi

Oleh : Sipra Mariana Gutandjala (01120026)

Keterlibatan warga jemaat dalam aktivitas-aktivitas politik memang bukanlah hal baru dalam masyarakat. Jemaat GPM Bethel Dobo menunjukkan rasa antusias serta kepekaan mereka terhadap persoalan politik melalui keterlibatan atau keikutsertaan mereka pada pilkada yang berlangsung bulan Desember 2015. Tentu maksud dan tujuan keterlibatan jemaat dalam proses ini tidak terbatas hanya untuk ikut meramaikan jalannya sebuah proses demokrasi saja, melainkan ada motivasi yang melatarbelakangi maksud setiap pribadi dalam jemaat yang memilih untuk terlibat. Misalnya saja ada yang memilih terlibat hanya untuk memperjuangkan keuntungan pribadi (menjual kesucian suaranya demi mendapat uang dari para kandidat yang mencalonkan diri), juga ada yang terlibat atas dasar sentimen suku, dengan prinsip orang di luar Aru (orang Cina) tidak mempunyai hak untuk memimpin jalannya pemerintahan di Aru karena itu, masyarakat Aru sebagai pemilih tidak boleh memilih orang/suku dari luar Aru untuk memimpin pemerintahan di Aru. Atau tujuan lain yang dapat kita lihat dari peristiwa pilkada 2015 di Aru ialah orang memilih terlibat untuk memenangkan kandidat yang memiliki hubungan darah dengan si pemilih agar supaya si pemilih mengalami kenaikan pangkat atau jabatan dalam instansi pemerintahan tertentu, atau agar supaya bisnis si pemilih dalam dunia pemerintahan berjalan dengan lancar. Berbagai motivasi ini kemudian menimbulkan dilema baru, lalu jika jemaat GPM Bethel Dobo disibukkan dengan tujuan-tujuan semacam ini, lantas bagaimana dengan nasib kaum lemah, orang miskin dan kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi dalam masyarakat? Jika proses demokrasi dijalani dan dimaknai seperti ini, lalu siapa yang akan memperjuangkan kepentingan orang banyak termasuk orang miskin dan mereka yang termarginal secara sosial dalam masyarakat?

Nilai-nilai Kristiani yang senantiasa diajarkan entah melalui khotbah atau pengajaran-pengajaran tentu tentu tidak mendukung terjadinya praktek-praktek atau tindakan-tindakan semacam ini. Karenanya tiga poin penting teologi Kristen yang digagas oleh Nelson sebetulnya ada untuk meluruskan pandangan jemaat serta berusaha mendamaikan dilema demokrasi yang ada. Tiga poin penting itu yakni kekuasaan, *koinonia* dan manusia. Bahwa terkait pemahaman akan relasi kekuasaan dengan demokrasi, baik jemaat sebagai pemilih maupun kandidat yang

mencalonkan diri sebagai calon pemimpin tidak bisa secara bebas menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menentukan pilihan seseorang atau membeli suara hati seseorang atau memaksa orang lain untuk mengikuti kemauan pribadi orang yang memiliki kuasa tersebut. Manusia yang dikarunai akal budi mesti memanusaiakan kekuasaan yang ada padanya. Sebab kekuasaan sendiri adalah anugerah atau titipan dari Tuhan kepada manusia. Oleh karenanya kekuasaan tidak seharusnya dipakai untuk menindas orang lain atau menguasai hak orang lain melainkan kekuasaan mesti dipakai untuk melayani orang lemah, memperjuangkan kepentingan banyak orang dan menghargai suara hati serta keputusan orang lain. Kemudian poin kedua yakni *koinonia*. Jika proses demokrasi dipahami hanya sebagai momen untuk memperjuangkan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum maka agaknya jemaat sedang keliru dalam memahami makna *koinonia* dalam rana penerapan yang lebih luas. *Koinonia* sendiri menekankan tentang persekutuan, kebersamaan, kekeluargaan. Karena itu keterlibatan jemaat GPM Bethel Dobo pada proses demokrasi Desember yang lalu mestinya memperjuangkan *koinonia* dalam rana yang luas. Kesadaran untuk mengutamakan kepentingan banyak orang diatas kepentingan pribadi serta kesediaan untuk memperjuangkan hak-hak orang lemah dan menghargai hak-hak individu dalam kebersamaan itu adalah sebuah wujud nyata dari penerapan *koinonia* dalam lingkup masyarakat. Inilah yang mesti dipahami oleh jemaat GPM Bethel Dobo.

Kemudian poin terakhir ialah pemahaman akan relasi demokrasi dan manusia. Bagian ini mengajarkan kita untuk berlaku layaknya manusia kepada sesama manusia. Sebab seringkali dalam praktek, hal yang sederhana ini justru tidak dipahami dengan baik. Sesama sering kita pahami hanya sebatas orang yang sekeyakinan dengan kita atau sesuku dengan kita saja. Sedangkan yang tidak sesuku atau sekeyakinan dengan kita, bukanlah sesama kita, apalagi musuh. Dengan demikian kontekstualisasi dari teologi Kristen terhadap persoalan demokrasi yang terjadi di tengah masyarakat selain untuk meluruskan pemahaman jemaat yang keliru dalam memahami makna kehadiran mereka di panggung demokrasi, teologi Kristen/nilai-nilai Kristen ini juga penting dalam membentuk karakter Kristen yang dewasa dalam menjawab kompleksitas persoalan baik persoalan sosial maupun politik yang terjadi di tengah jemaat dan masyarakat.

Kata Kunci : Jemaat GPM Bethel Dobo, demokrasi, manusia, *koinonia*, kuasa, kontekstualisasi teologi Kristen.

Lain-lain :

ix+76 ; 2016

Dosen Pembimbing : Pdt Paulus Sugeng Widjaja, MAPS., Ph.D

©UKDWN

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SIPRA MARIANA GUTANDJALA

NIM : 01120026

Judul Skripsi : GPM Bethel Dobo Dalam Kancan Realita Demokrasi di Indonesia
(Sebuah tinjauan teologis atas sikap serta keterlibatan jemaat GPM Bethel
Dobo dalam memaknai demokrasi melalui proses Pilkada bulan Desember
2015)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua catatan referensi yang jelas telah dituliskan bagi setiap pemikiran orang lain atau tulisan orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi periksa bagi semua pihak.

Yogyakarta, 4 Januari 2017

Penyusun



Sipra Mariana Gutandjala

Abstrak

Pemahaman jemaat GPM Bethel Dobo akan makna demokrasi

Oleh : Sipra Mariana Gutandjala (01120026)

Keterlibatan warga jemaat dalam aktivitas-aktivitas politik memang bukanlah hal baru dalam masyarakat. Jemaat GPM Bethel Dobo menunjukkan rasa antusias serta kepekaan mereka terhadap persoalan politik melalui keterlibatan atau keikutsertaan mereka pada pilkada yang berlangsung bulan Desember 2015. Tentu maksud dan tujuan keterlibatan jemaat dalam proses ini tidak terbatas hanya untuk ikut meramaikan jalannya sebuah proses demokrasi saja, melainkan ada motivasi yang melatarbelakangi maksud setiap pribadi dalam jemaat yang memilih untuk terlibat. Misalnya saja ada yang memilih terlibat hanya untuk memperjuangkan keuntungan pribadi (menjual kesucian suaranya demi mendapat uang dari para kandidat yang mencalonkan diri), juga ada yang terlibat atas dasar sentimen suku, dengan prinsip orang di luar Aru (orang Cina) tidak mempunyai hak untuk memimpin jalannya pemerintahan di Aru karena itu, masyarakat Aru sebagai pemilih tidak boleh memilih orang/suku dari luar Aru untuk memimpin pemerintahan di Aru. Atau tujuan lain yang dapat kita lihat dari peristiwa pilkada 2015 di Aru ialah orang memilih terlibat untuk memenangkan kandidat yang memiliki hubungan darah dengan si pemilih agar supaya si pemilih mengalami kenaikan pangkat atau jabatan dalam instansi pemerintahan tertentu, atau agar supaya bisnis si pemilih dalam dunia pemerintahan berjalan dengan lancar. Berbagai motivasi ini kemudian menimbulkan dilema baru, lalu jika jemaat GPM Bethel Dobo disibukkan dengan tujuan-tujuan semacam ini, lantas bagaimana dengan nasib kaum lemah, orang miskin dan kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi dalam masyarakat? Jika proses demokrasi dijalani dan dimaknai seperti ini, lalu siapa yang akan memperjuangkan kepentingan orang banyak termasuk orang miskin dan mereka yang termarginal secara sosial dalam masyarakat?

Nilai-nilai Kristiani yang senantiasa diajarkan entah melalui khotbah atau pengajaran-pengajaran tentu tentu tidak mendukung terjadinya praktek-praktek atau tindakan-tindakan semacam ini. Karenanya tiga poin penting teologi Kristen yang digagas oleh Nelson sebetulnya ada untuk meluruskan pandangan jemaat serta berusaha mendamaikan dilema demokrasi yang ada. Tiga poin penting itu yakni kekuasaan, *koinonia* dan manusia. Bahwa terkait pemahaman akan relasi kekuasaan dengan demokrasi, baik jemaat sebagai pemilih maupun kandidat yang

mencalonkan diri sebagai calon pemimpin tidak bisa secara bebas menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menentukan pilihan seseorang atau membeli suara hati seseorang atau memaksa orang lain untuk mengikuti kemauan pribadi orang yang memiliki kuasa tersebut. Manusia yang dikarunai akal budi mesti memanusaiakan kekuasaan yang ada padanya. Sebab kekuasaan sendiri adalah anugerah atau titipan dari Tuhan kepada manusia. Oleh karenanya kekuasaan tidak seharusnya dipakai untuk menindas orang lain atau menguasai hak orang lain melainkan kekuasaan mesti dipakai untuk melayani orang lemah, memperjuangkan kepentingan banyak orang dan menghargai suara hati serta keputusan orang lain. Kemudian poin kedua yakni *koinonia*. Jika proses demokrasi dipahami hanya sebagai momen untuk memperjuangkan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum maka agaknya jemaat sedang keliru dalam memahami makna *koinonia* dalam rana penerapan yang lebih luas. *Koinonia* sendiri menekankan tentang persekutuan, kebersamaan, kekeluargaan. Karena itu keterlibatan jemaat GPM Bethel Dobo pada proses demokrasi Desember yang lalu mestinya memperjuangkan *koinonia* dalam rana yang luas. Kesadaran untuk mengutamakan kepentingan banyak orang diatas kepentingan pribadi serta kesediaan untuk memperjuangkan hak-hak orang lemah dan menghargai hak-hak individu dalam kebersamaan itu adalah sebuah wujud nyata dari penerapan *koinonia* dalam lingkup masyarakat. Inilah yang mesti dipahami oleh jemaat GPM Bethel Dobo.

Kemudian poin terakhir ialah pemahaman akan relasi demokrasi dan manusia. Bagian ini mengajarkan kita untuk berlaku layaknya manusia kepada sesama manusia. Sebab seringkali dalam praktek, hal yang sederhana ini justru tidak dipahami dengan baik. Sesama sering kita pahami hanya sebatas orang yang sekeyakinan dengan kita atau sesuku dengan kita saja. Sedangkan yang tidak sesuku atau sekeyakinan dengan kita, bukanlah sesama kita, apalagi musuh. Dengan demikian kontekstualisasi dari teologi Kristen terhadap persoalan demokrasi yang terjadi di tengah masyarakat selain untuk meluruskan pemahaman jemaat yang keliru dalam memahami makna kehadiran mereka di panggung demokrasi, teologi Kristen/nilai-nilai Kristen ini juga penting dalam membentuk karakter Kristen yang dewasa dalam menjawab kompleksitas persoalan baik persoalan sosial maupun politik yang terjadi di tengah jemaat dan masyarakat.

Kata Kunci : Jemaat GPM Bethel Dobo, demokrasi, manusia, *koinonia*, kuasa, kontekstualisasi teologi Kristen.

Lain-lain :

ix+76 ; 2016

Dosen Pembimbing : Pdt Paulus Sugeng Widjaja, MAPS., Ph.D

©UKDWN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Gereja dalam mencari dan membentuk identitasnya, tentu tidak terlepas dari berbagai persoalan yang terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks di mana gereja itu hidup dan melakukan apa yang menjadi misi pelayanannya. Berbicara mengenai gereja, tentunya perlu ada penjelasan terlebih dahulu tentang hakekat gereja itu sendiri. Gereja memiliki makna yang luas. Karena itu maka selalu ada upaya dari para teolog untuk memberikan sembarang pemikiran/pandangan tentang apa itu gereja. Avery Dulles misalnya, menguraikan gereja menjadi 5 model yakni (1) gereja sebagai institusi, (2) gereja sebagai persekutuan mistik, (3) gereja sebagai sakramen, (4) gereja sebagai pewarta, (5) gereja sebagai hamba.¹

1. Gereja Sebagai Institusi

Dulles menggambarkan gereja sebagai sebuah institusi karena pada hakekatnya gereja adalah suatu “masyarakat yang sempurna”, dalam arti gereja tidak tunduk kepada suatu masyarakat lain, dan juga gereja memenuhi semua syarat yang dituntut oleh suatu institusi yang sempurna.² Gagasan gereja sebagai sebuah institusi lebih cenderung mengutamakan struktur kepemimpinan sebagai elemen formal dalam gereja. Pandangan ini mendefinisikan gereja berdasarkan struktur-strukturnya yang kelihatan khususnya hak-hak dan wewenang dari para pejabatnya.

2. Gereja Sebagai Persekutuan Mistik

Dulles mengutip pandangan Arnold Rademacher dalam bukunya yang berjudul *Die Kirche als Gemeinschaft und Gesellschaft* yang berpendapat bahwa pada hakikatnya gereja adalah sebuah persekutuan (*Gemeinschaft*) dan di bagian luarnya merupakan sebuah masyarakat (*Gesellschaft*). Masyarakat merupakan manifestasi lahiriah dari persekutuan. Masyarakat ada

¹Avery Dulles, *Model-model Gereja* (NTT: Nusa Indah, 1990), h 13

²Id. , h. 33

untuk menunjang terjadinya persekutuan tersebut. Persekutuan sama dengan Kerajaan Allah dan Persekutuan Para Kudus.³

3. Gereja Sebagai Sakramen

Dules juga mengutip pandangan Henri de Lubac, seorang teolog abad ke-20 yang mengatakan bahwa unsur ilahi dan unsur manusiawi di dalam gereja tidak pernah dapat dipisahkan. Artinya manusia mengaku sakramen sebagai pengikat relasi antara manusia dengan Allah. Karena itu, jika Kristus adalah sakramen Allah, maka gereja merupakan sakramen Kristus bagi kita.⁴

4. Gereja Sebagai Pewarta

Pandangan ini lebih cenderung mengutamakan *Sabda*. Menurut pandangan ini gereja dikumpulkan dan dibentuk oleh Sabda Allah. Gereja mesti menyadari akan kehadirannya di tengah dunia yaitu untuk mewartakan misi Allah. Gereja mesti menwartakan apa yang sudah didengarnya, diimaninya, dan yang sudah diserahkan kepadanya untuk diwartakan.

5. Gereja Sebagai Hamba

Gereja perlu sungguh-sungguh menyadari kehadirannya sebagai tubuh Kristus, hamba yang menderita. Karena itu ia harus menjadi gereja yang melayani. Gereja adalah manifestasi kehadiran Kristus dimana kehadiranNya tidak hanya untuk memaklumkan kerajaan Allah, melainkan memberikan diriNya demi perwujudanNya. Dia datang untuk melayani, menyembuhkan, mendamaikan, dan membalut yang terluka.

Kita tentu tidak asing dengan nyanyian kidung jemaat no 257, terjemahan A. Simanjuntak “Aku Gereja, Kau Pun Gereja”, yang mana salah satu bagian penggalan liriknya ialah gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya: bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Apa yang dimaksud dengan “orangnya”? Orangya bisa berarti Pendeta, Majelis Jemaat dan jemaat itu sendiri. Itu sebabnya tak dapat dipungkiri bahwa pembicaraan tentang politik bisa saja melibatkan gereja yang adalah lembaga keagamaan sebagai subjek

³Id. , h.46

⁴Id. , h. 60

utama, atau jemaat (masyarakat) yang juga adalah pelaku politik itu sendiri, atau pendukung-pendukung dari partai politik yang ada, atau bahkan konflik-konflik politik sebagai point persoalan yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, fokus penulis pada penulisan skripsi ini yakni pada persoalan pemahaman jemaat GPM Bethel Dobo akan makna demokrasi melalui peristiwa atau proses pilkada bulan Desember 2015 yang telah dilewati. Itu berarti yang menjadi subjek utama dalam penulisan skripsi ini adalah warga jemaat. Jika menyesuaikan pada ke-5 model gereja yang disajikan oleh Dulles yang telah penulis paparkan diatas, berarti fokus penulis dalam tulisan ini berada pada poin atau bagian gereja sebagai persekutuan mistik. Penulis menegaskan bagian ini dengan mengutip pendapat Rademacher sekali lagi yang mengatakan bahwa gereja adalah sebuah persekutuan (*Gemeinschaft*) dan di bagian luarnya merupakan sebuah masyarakat (*Gesellschaft*). Masyarakat merupakan manifestasi lahiriah dari persekutuan. Masyarakat itu berada untuk menunjang terjadinya persekutuan tersebut. Persekutuan itu adalah gereja benar sebagai lawan dari gereja nyata; persekutuan sama dengan kerajaan Allah dan persekutuan para kudus.⁵ Jemaat adalah anggota tetap dari sebuah persekutuan yang bernama gereja. Karenanya jemaat (persekutuan) ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya masyarakat, bahkan jemaat (persekutuan) ini juga tidak akan mampu menghadapi realita atau kompleksitas persoalan yang ada dalam masyarakat tanpa bimbingan dari kepalanya (gereja sebagai sebuah lembaga). Karenanya dalam menjalankan misi atau peran masing-masing di tengah dunia, ketiganya mesti berjalan bersama dengan tidak mendahului antara satu dengan lainnya.

Seringkali gereja sebagai sebuah lembaga kurang menyadari kompleksitas persoalan yang tengah dihadapi oleh jemaatnya. Gereja kurang atau mungkin tidak pernah memberikan pemahaman kepada warga jemaat tentang bagaimana menghadapi berbagai situasi atau realita persoalan zaman yang sedang terjadi. Gereja terlalu sibuk untuk mengurus urusan-urusan yang bersifat struktural saja ketimbang mengurus berbagai macam persoalan yang tengah dihadapi oleh jemaatnya dalam konteks tertentu. Urusan struktural yang dimaksud misalnya gereja yang sibuk mengurus persidangan-persidangan dalam jemaat, baik persidangan jemaat maupun persidangan klasis.

Realita ini kemudian dilihat tidak sebagai sebuah masalah dalam gereja. Namun jika disadari, hal ini sebenarnya merupakan persoalan yang cukup serius bagi gereja sebab agenda-agenda yang dibahas dalam persidangan selalu menyangkut keuangan gereja, struktur organisasi dalam

⁵*ibid*

gereja, bahkan topik diskusi dalam sidang yang membahas mengenai keuangan gereja (persembahan setiap Minggu dan sumbangan bagi gereja), bisa ber-akhir dengan perkelahian yang cukup serius antara pendeta jemaat sebagai pemimpin sidang dengan jemaat sebagai peserta sidang itu sendiri. Kita dapat menjumpai realita seperti ini dalam setiap persidangan-persidangan yang terlaksana dalam jemaat. Contoh konkret ialah pada persidangan jemaat yang berlangsung di jemaat GPM Bethel Dobo, April 2016. Hanya perihal keuangan gereja saja, bisa menuai perdebatan panjang antara jemaat sebagai peserta persidangan dengan para pendeta sebagai pemimpin persidangan. Sangat jarang sidang-sidang yang berlangsung khususnya di jemaat GPM Bethel Dobo baik itu sidang klasis maupun sidang jemaat yang mengangkat persoalan sosial apalagi persoalan terkait dengan gejolak politik yang tengah dihadapi oleh jemaat sebagai sebuah tema sentral atau setidaknya tema “pilihan” untuk didiskusikan dalam setiap persidangan yang ada. Padahal persoalan-persoalan semacam ini jika disadari merupakan persoalan yang cukup krusial dalam jemaat. Oleh karena itu, maka ketika jemaat berhadapan dengan realita ini, yang terjadi adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan iman Kristen tetapi justru tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik dan gereja mungkin tidak menyadari akan hal ini. Jemaat mesti dibekali bukan hanya dengan isi khotbah pada setiap Minggu saja, melainkan juga dengan pemahaman Kristen yang benar akan fenomena sosial politik yang terjadi di zaman dewasa ini.

Indonesia belum lama usai merayakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum kepala kepala daerah atau yang kita kenal dengan istilah Pilkada pada bulan Desember 2015 yang telah kita lewati. Momen ini tentunya merupakan salah satu momen penting negara Indonesia, momen bersama yang dirayakan oleh warga negara Indonesiadi daerah-daerah tertentu untuk memilih para pemimpin dan wakil pemimpinnya, tidak terkecuali umat Kristen yang ada di Kabupaten kepulauan Aru (jemaat GPM Dobo). Berbicara mengenai Pemilihan Umum kepala daerah (Pilkada) atau pemimpin dalam suatu daerah tertentu entah itu gubernur ataupun bupati, berarti berbicara tentang persoalan demokrasi. Kita tentunya akan selalu sampai pada pembicaraan tentang konsep demokrasi serta bagaimana hal ini dipahami. Ketika jemaat diperhadapkan dengan salah satu agenda negara, misalnya pemilihan kepala daerah, maka pada saat yang sama jemaat menggunakan hak demokrasi untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Hak demokrasi yang seperti apa? Hak untuk terlibat, hak untuk bebas memilih dan menyampaikan suaranya tanpa paksaan dari orang lain. Pertanyaannya sejauh mana mereka (jemaat) memahami hak-hak ini. Kekaburan konseptual tentang demokrasi dapat mempengaruhi sikap dan cara pandang jemaat terhadap demokrasi itu sendiri.

Andreas Yewangoe membagi demokrasi menjadi dua bagian penting yakni *demokrasi langsung*, sebagaimana diterapkan di dalam negara-kota Yunani kuno (misalnya Atena), dan di beberapa *kanton* negeri Swiss; dan *demokrasi tidak langsung*, yang menganggap bahwa dalam prakteknya, kehendak mayoritas rakyat diasumsikan telah dicerminkan dalam bentuk keputusan yang diambil oleh wakil-wakil mereka.⁶ Demokrasi sebagai sebuah sistem penyelenggaraan kekuasaan, tentunya telah mengukir banyak kisah dalam perjalanan sejarah yang panjang. Kita dapat belajar dari sistem demokrasi yang diterapkan di negara-kota Yunani Kuno (Atena), praktek demokrasi langsung telah diterapkan. Konon, untuk memutuskan segala sesuatu, warga datang ke sebuah lapangan guna menyampaikan aspirasi. Atas dasar itu, lalu diambil keputusan yang mengikat seluruh warga negara-kota tersebut.

Indonesia sebagai sebuah negara mandiri, tentunya telah mengukir sejarah perjalanan panjang sistem demokrasi. Kembali melihat sejarah bangsa Indonesia sebagai negara yang memperjuangkan proses demokrasi tentunya kita tidak asing dengan pemerintahan seorang Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran berbicara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan pendapatnya:

“dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan itu kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan.

Soekarno kemudian melanjutkan dengan mengatakan: *apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.*⁷Pemikiran ini kemudian diterima dan menjadi landasan dalam memutuskan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi. Seperti yang termuat dalam UUD 1945 bab I pasal 1, bahwa semua kedaulatan negara berasal dari rakyat, dan proses penyelenggaraan negara berada dalam kendali rakyat. Kembali lagi kepada tujuan pembangunan negara. Rakyat Indonesia mendirikan negara karena memang negara dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik. Itulah makna negara yang sesungguhnya. Untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan bukan kepentingan satu pihak saja. Bukan juga kepentingan orang kaya saja melainkan kepentingan semua orang, semua suku, semua

⁶Andreas Yewangoe, *Tidak Ada Negara Agama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), h. 108

⁷Merphin Panjaitan, *Logika Demokrasi* (Jakarta: Permata Aksara, 2013), h. 2

golongan tanpa memandang status sosial atau lain sebagainya. Dengan demikian maka meski dikatakan bahwa negara berada dalam kendali rakyat, bukan berarti rakyat diperbolehkan untuk berbuat semena-mena sesuai kehendaknya. Negara berada di dalam kendali rakyat berarti rakyat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengusahakan keadilan serta kesejahteraan bersama dalam sebuah negara demi dan untuk kepentingan rakyat sendiri. Republik Indonesia didirikan untuk kepentingan rakyat Indonesia bukan rakyat Indonesia diadakan supaya negara Republik Indonesia dapat dibentuk. Dengan menyadari akan hal ini maka pemerintah dalam penyusunan dan menjalankan program-program juga mesti mengedepankan kesejahteraan rakyat.

Akan tetapi negara sewaktu-waktu juga bisa menjadi monster yang justru akan menindas dan membunuh rakyat.⁸ Hal ini terjadi ketika kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat kepada para pemimpin (penguasa) disalahgunakan. Oleh karena itu maka rakyat dibutuhkan untuk mengontrol jalannya kepemimpinan dalam negara. Sebuah negara mestinya terus menerus memperbaharui sistem dan prosedur ketatanegaraannya menjadi lebih demokratis agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Penting bagi kita untuk mengingat bahwa demokrasi memiliki makna yang berbeda apabila diterapkan dalam suatu konteks (budaya) tertentu. Oleh karenanya maka kendatipun kita memakai istilah yang sama yaitu demokrasi, namun belum tentu pemahaman orang dalam memahami hal ini sama. Misalnya pemahaman demokrasi yang dipahami oleh masyarakat Maluku dengan konteks budaya Maluku belum tentu sama dengan pemahaman masyarakat Yogyakarta dalam budaya Jawa. Begitu pula sebaliknya. Bahkan penerapan demokrasi sendiri dalam satu konteks (budaya) belum tentu sama dengan penerapan demokrasi dalam konteks (budaya) yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada dalam masyarakat misalnya faktor budaya, agama, status sosial, pola/cara berpikir dan lain sebagainya. Inilah kenyataan yang mungkin sering kita jumpai terjadi dalam “pesta-pesta” pemilihan umum di daerah kita masing-masing.

Berbicara mengenai sebuah konsep demokrasi, ada begitu banyak upaya menarik berbagai pihak baik para ahli maupun tokoh-tokoh politik atau mereka yang berkiprah dalam dunia pemerintahan (elite politik) yang kemudian melahirkan ide-ide kritis tentang makna dari sebuah demokrasi. Salah satu pemikiran terkenal yang seringkali bahkan sampai sekarang masih digunakan oleh negara-negara sekuler sebagai landasan utama dalam

⁸Id. , h. 4

membangun/mengusahakan sebuah negara/pemerintahan yang demokrasi yaitu pandangan demokrasi menurut Abraham Lincoln⁹ yang menyebut demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.¹⁰ Kalimat ini hendak menjelaskan bahwa subjek utama atau tokoh sentral dari sebuah bentuk pemerintahan yang demokratis adalah rakyat. Oleh karena itu, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Dalam artian bahwa rakyat secara bersama-sama memerintah diri mereka sendiri dengan memilih sebagian dari antara mereka untuk memimpin atau menjadi penyelenggara negara. Sistem ini menghendaki rakyat untuk memilih secara bebas seorang yang dianggap mampu dan memiliki potensi untuk memimpin atau memperjuangkan hak mereka (rakyat). Tidak satu orangpun boleh menjadi pemerintah tanpa persetujuan dari rakyat. Termasuk kesetaraan manusia semuanya diatur dalam dalam bentuk perundang-undangan dan diberlakukan secara adil kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian maka makna demokrasi yang sesungguhnya adalah pemerintahan semua buat semua. Itu berarti bahwa baik proses pembuatan kebijakan negara, pengawasan kerja semua lembaga negara wajib mengikutsertakan warga negara dalam proses pengambilan keputusan.¹¹ Demokrasi bukan sekedar pemerintahan oleh mayoritas, entah mayoritas permanen yaitu karena adanya ciri permanen seperti ras, suku dan agama atau mayoritas karena menang pemilihan umum.

Demokrasi adalah pemerintahan seluruh rakyat, termasuk kaum lemah, miskin dan kaum marginal lainnya. Namun dalam realita yang terjadi, kerap kali kita menjumpai praktek-praktek yang justru memarginalkan mereka yang lemah. Sebuah istilah yang tidak lazim dan yang selalu populer kita dengar di kalangan masyarakat terutama pada masa-masa menjelang pemilihan-pemilihan umum yaitu *siapa menang, dia dapat*. Dalam artian bahwa siapa yang menang dalam proses pemilihan umum maka dialah yang berhak penuh untuk memerintah atas rakyat. Misalnya dalam pemilihan kepala daerah atau yang tak asing kita kenal dengan sebutan Pilkada. Seringkali yang terjadi adalah bahwa ketika seorang calon dari partai tertentu berhasil terpilih maka dialah yang berkuasa atas rakyat tanpa melihat kebutuhan rakyat kecil. Indonesia dalam merintis sebuah perjalanan menuju pemerintahan yang demokratis, tentu tidak terlepas dari situasi-situasi semacam ini. Selalu ada upaya dari negara untuk memberikan ruang gerak yang bebas bagi rakyat dalam menentukan pilihan mereka.

⁹Mantan presiden Amerika Serikat

¹⁰Tulisan Yahya Wijaya dalam *Majalah Gema Duta Wacana DEMOKRASI No.44*, 1992, h.79

¹¹Merphin Panjaitan, *Logika Demokrasi* (Jakarta: Permata Aksara, 2013), h. 1

Salah satu bukti nyata bahwa Indonesia adalah negara yang memberlakukan sistem demokrasi adalah melalui peristiwa Pemilihan Umum. Baik pemilihan presiden, gubernur, dan pemilihan bupati atau yang kita kenal sebagai pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pengaturan pilkada diatur dalam UU No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wakota. Itu berarti pilkada tidak hanya tercatat sebagai sebuah rumusan baku dalam Perppu saja, melainkan pilkada kemudian merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan juga sebagai wadah bagi masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin dan wakil pemimpin daerah secara kritis dan bertanggung jawab.

Pilkada berlangsung di beberapa daerah yang ada di Indonesia salah satunya Provinsi Maluku. Kabupaten Kepulauan Aru adalah satu dari delapan kabupaten yang belum lama dimekarkan menjadi kabupaten baru di Provinsi Maluku dengan kepemimpinan bupati dan wakil bupati. Dengan demikian maka penulis merasa penting untuk mengkaji ulang isu pilkada pada bulan Desember 2015 yang telah dilewati untuk melihat sejauh mana gereja (jemaat) memahami konsep demokrasi dan implemenasinya dalam menata kehidupan bersama.

1.2 Permasalahan dan Pembatasan Masalah

Pembicaraan mengenai relasi antara kekristenan dan demokrasi merupakan topik pembicaraan yang selalu baru, hangat, menarik dan problematis untuk dibahas dan didiskusikan oleh semua orang. Andreas Yewangoe dalam bukunya mengutip pandangan Huber yang mengatakan bahwa sebetulnya iman Kristiani dan nilai-nilai demokrasi memiliki suatu keterkaitan yang erat akan tetapi relasi ini dipersulit oleh jarak historis gereja-gereja terhadap demokrasi.¹² Mengingat pemahaman teologi klasik yang dipegang gereja bahwa politik dan gereja memang semestinya dipisahkan jauh sebab keduanya saling bertentangan. Tugas gereja adalah mengurus hal-hal yang berbau surgawi, sedangkan tugas politik adalah mengurus hal-hal yang berbau duniawi dan karena itu maka keduanya tidak layak disatukan. Akan tetapi mesti diakui bahwa Kekristenan di Barat sendiri cukup memberikan sumbangan yang responsif terhadap demokrasi. Landasan ideologi yang menjadi dasar adalah berangkat dari kesaksian para nabi Yahudi pada zaman itu yang juga tercatat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Isi dari visi nabi-nabi Israel itu adalah untuk menentang struktur sosial yang tidak adil. Pemikiran ini kemudian

¹²Andreas Yewangoe, *Tidak Ada Negara Agama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2009), h. 114

dilihat sebagai dasar bagi pembentukan tradisi demokrasi di Barat. Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa demokrasi bukanlah sebuah persoalan yang baru. Demokrasi bahkan sudah ada sejak jaman Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yesus dalam perjalanan pelayanannya tentu saja juga mengajarkan secara langsung tentang apa itu demokrasi. Kita dapat melihat bagaimana sikap Yesus dalam merespon tradisi demokrasi yang ada pada zamannya. Yewangoe dalam bukunya memaparkan beberapa sikap Yesus dalam merespon fenomena demokrasi yang terjadi pada saat itu yakni

- a. Ketika Yesus menantang dan menentang pola-pola kepemimpinan yang otoriter dan patriarkal dalam Yudaisme, maupun dalam bangsa-bangsa sekitarnya;
- b. Yesus peduli pada kebutuhan umat bahkan sampai per individu dan karenanya peduli pula pada kebebasan mereka dari berbagai macam bentuk tekanan yang merusak kualitas kehidupan yang dikehendaki Allah. Yesus juga menolak sikap legalisme dan ortodoksi kaku dan meneguhkan semangat kebebasan yang bertanggung jawab.
- c. Yesus menentang ketidakadilan sosial dan ekonomi, sebagaimana tampak dalam ajaran-ajarannya maupun dalam sikap-sikapnya. Ketika Yesus menasihatkan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka secara tidak langsung seruan Yesus ini menyiratkan sebuah tantangan kenabian yang jelas untuk mengupayakan keadilan, khususnya bagi kaum miskin sebagai landasan kehidupan sosial (Mat 6:33).¹³

Berbagai sikap Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus sangat memahami fenomena demokrasi yang ada di zamannya dan kemudian terlibat untuk menyikapi berbagai persoalan-persoalan tersebut. Pelayanan Yesus bukan hanya terbatas pada nubuat-nubuat/mujizat-mujizat saja, melainkan Yesus juga bersentuhan langsung dengan persoalan sosial politik yang terjadi pada saat itu. Bahkan menarik untuk melihat bahwa makna kerajaan Allah sendiri tidak melulu mengarah kepada hal-hal yang bernuansa sorgawi, akan tetapi kerajaan Allah dapat kita pahami sebagai sebuah gambaran akan suasana damai, adil dan sejahtera yang dirasakan oleh semua ciptaan yang ada di bumi.

Selain itu, hal penting yang juga dapat kita maknai dari perjalanan pelayanan Yesus ini ialah bahwa tujuan utama kesaksian Yesus tentang kebenaran pemerintahan Allah sebetulnya sedang memberikan kritik yang radikal terhadap semua sistem politik yang merendahkan

¹³Andreas Yewangoe, *Tidak Ada Negara Agama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2009), h. 117-118

martabat manusia melalui berbagai diskriminasi yang dilakukan kepada mereka yang lemah. Itu berarti umat Kristiani mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan semua umat manusia tanpa membeda-bedakan yang lemah dan yang “kuat” melalui keterlibatan dalam berbagai aktifitas-aktifitas politik yang bertanggung jawab. Pertanyaannya sejauh mana partisipasi umat Kristen dalam mewujudkan “Kerajaan Allah” yang ada di bumi melalui “pergaulannya” dengan politik atukah panggilan umat Kristen di ladang politik hanya sebatas pokok doa yang tercantum dalam salah satu poin liturgi untuk di doakan pada hari Minggu saja? Setahun yang lalu, negeri kita diramalkan oleh pilkada yang diselenggarakan dimana-mana, tanpa terkecuali Kabupaten Aru, Maluku. Pelaksanaan pilkada sebenarnya adalah sesuatu yang baru di dalam budaya politik bangsa kita setelah sekian lama “ditawan” di dalam budaya politik Orde Baru yang bersifat otoriter.¹⁴ Kendatipun pilkada masih merupakan hal baru bagi bangsa ini, namun sebenarnya proses ini menunjukkan kepada kita bahwa negara kita, Indonesia perlahan-lahan sedang merintis sebuah perjalanan demokrasi dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Suatu hal yang “mahal” dan tidak banyak diwujudkan di banyak negara. Indonesia bahkan dijuluki sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India.¹⁵ Suatu kebanggaan besar bagi kita untuk disyukuri, tapi juga sebuah tanggung jawab bersama untuk senantiasa diperjuangkan.

Memang dalam upaya untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang demokratis, tentu ada harga yang harus di bayar. Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak berjalan mulus-mulus saja. Selalu ada dinamika sosial yang juga hadir dalam mewarnai proses demokrasi itu sendiri. Tidak sedikit kita mendengar bahkan menjumpai konflik-konflik yang berlatar politik yang hadir mewarnai sejarah demokrasi Indonesia. Tahun-tahun sebelumnya bahkan tahun 2015 yang baru saja kita lewati dengan penuh semangat nasionalisme untuk merayakan pesta demokrasi, tentu tidak luput juga dari kontroversi yang ada. Konflik antar kelompok-kelompok kecil di dalam masyarakat (konflik antar marga, antar suku, antar partai bahkan antar saudara) atau bahkan konflik antar calon pemimpin dengan masyarakat seakan menjadi tradisi yang selalu hadir pada setiap periode pemilihan pemimpin-pemimpin daerah. Baik pemilihan presiden, gubernur maupun pemilihan bupati. Oleh karenanya maka pemilihan umum yang mestinya menjadi wadah tumbuhnya sebuah proses demokrasi, justru seakan menjadi ajang unjuk rasa atau adu kekuatan dan kekuasaan yang kemudian berujung pada konflik, sesuatu yang tentu tidak diinginkan bersama.

¹⁴Andreas Yewangoe, *Tidak Ada penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Bangsa* ((Jakarta: BPK Gunung Mulia 2009), h. 221

¹⁵id. , h. 222

Fenomena semacam ini tidak jarang kita jumpai terjadi di daerah-daerah tertentu yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Di Kabupaten Aru, Maluku misalnya. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis pada Pilkada 2015 yang berlangsung di beberapa daerah yang ada di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kepulauan Aru khususnya, dapat penulis katakan bahwa suasana pilkada yang berlangsung di Aru masih sangat jauh dari sebuah suasana pilkada, sebuah suasana demokrasi yang damai. Konflik antar kelompok-kelompok masyarakat masih sangat ramai apalagi pada masa-masa pra-pilkada.

Berdasarkan pengamatan penulis, konflik yang terjadi ber-awal dari keterlibatan jemaat dalam kubuh-kubuh yang dibentuk oleh para pendukung dari beberapa kandidat yang mencalonkan diri yang ada dengan motivasi persaingan yang agaknya tidak “sehat”. Dalam keterlibatannya, kelompok partai yang satu akan mengajak kelompok partai yang lain untuk memberikan suara atau terlibat dalam partainya supaya calon bupati yang berasal dari kelompok partainya sukses dan memenangkan pilkada. Akan tetapi kelompok partai yang satunya tidak akan mau memberikan suaranya kepada kelompok yang satunya karena kelompoknya tentunya mempunyai ambisi tersendiri untuk memenangkan calonnya. Sudah tentu bahwa baik para pendukung partai-partai politik yang ada, juga para calon bupati yang mencalonkan diri, mereka adalah warga jemaat yang bergereja di GPM Bethel Dobo. Kita dapat membayangkan bahwa semisal ada 5 partai yang sedang berjuang untuk memenangkan calonnya, keseluruhan pendukung aktif dari 5 partai ini adalah warga jemaat, dan tentunya ada kelompok-kelompok warga jemaat lain yang dilibatkan untuk bergabung dalam lima partai tersebut untuk memenangkan masing-masing calonnya dengan ambisi untuk memperoleh kekuasaan, maka tentunya potensi terjadinya konflik di jemaat bisa dikatakan sangat kuat. Penulis mengibaratkan situasi ini seperti sejumlah rakitan bom yang siap diledakan. Keterlibatan warga jemaat dalam aktifitas-aktifitas partai politik sebenarnya bukan suatu hal yang salah. Hal ini justru menunjukkan bahwa orang Kristen mempunyai kepekaan terhadap fenomena politik yang ada di sekitar gereja. Akan tetapi tindakan ini kemudian menjadi salah ketika motivasi yang diperjuangkan tidak lain adalah ambisi pribadi atau kelompok untuk memenangkan calon bupati dan wakil bupati dari partai mereka masing-masing yang kemudian melibatkan masyarakat ‘kecil’ untuk mendukung tujuan tersebut dan lagi-lagi situasi ini kemudian berujung pada konflik antar warga masyarakat/warga jemaat itu sendiri.

Fokus penulis disini sebenarnya bukan pada konflik pra-pilkada yang terjadi di Aru seperti yang telah penulis paparkan, namun penulis merasa penting untuk sedikit memaparkan

kronologi konflik yang terjadi pada masa-masa pra-pilkada, sebab dengan begitu maka setidaknya pemaparan kronologi konflik ini akan membantu pembaca untuk memahami gambaran konteks jemaat GPM Dobo. Oleh sebab itu, berangkat dari semua uraian tentang proses demokrasi yang ada di Indonesia dan paparan situasi Pilkada yang terjadi dalam konteks jemaat/masyarakat Aru, maka persoalan yang relevan dan penting untuk ditelusuri lebih dalam adalah terkait dengan proses demokrasi melalui pilkada Desember 2015 yang berlangsung di Indonesia umumnya, dan kabupaten kepulauan Aru (jemaat GPM Dobo) khususnya. Dengan demikian maka penulis membatasi pembahasan ini dengan sebuah rumusan pertanyaan besar yakni **“Sejauh mana jemaat GPM Bethel Dobo memahami makna demokrasi?”**. Pertanyaan ini nantinya akan menuntun penulis untuk menggali lebih jauh lagi seperti apa pemahaman jemaat GPM dobo tentang makna demokrasi melalui keterlibatan mereka dalam mengikuti pilkada pada bulan Desember 2015 yang telah dilewati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

1.3 Judul Skripsi dan Alasan Pemilihan Judul

Penulis memberi judul **“GPM Bethel Dobo dalam Kancah Realita Demokrasi Di Indonesia”**

“Sebuah tinjauan teologis atas sikap serta keterlibatan jemaat GPM Bethel Dobo dalam memaknai demokrasi melalui proses Pilkada bulan Desember 2015”

Alasan penulis memilih judul ini sejujurnya adalah karena penulis secara pribadi merasa kagum dengan satu langkah maju yang telah dicapai oleh GPM Dobo (baca: jemaat) melalui kehadiran mereka di panggung politik (pilkada). Penulis berasumsi bahwa kehadiran mereka (jemaat) untuk mengambil bagian dalam dunia politik ini berangkat dari sebuah kesadaran bahwa dua hal ini yakni gereja dan politik bukan lagi merupakan dua kubuh yang mesti dipisahkan, sebab keduanya memiliki relasi yang mesti dijaga kesuciannya. Pertannyaanya sejauh mana pemahaman jemaat GPM Dobo dalam memahami relasi ke-dua hal ini, serta bagaimana mereka memahami kehadiran mereka selaku warga jemaat sekaligus warga negara yang baik.

Melihat betapa jemaat GPM Bethel dobo dengan begitu antusias berpartisipasi untuk mensukseskan pesta demokrasi yakni pilkada yang berlangsung pada tahun lalu, ada dua kemungkinan motivasi keterlibatan mereka yang kemudian muncul dalam benak penulis. Kemungkinan *pertama*, yaitu keterlibatan mereka (jemaat) semata-mata hanya untuk

memperjuangkan kepentingan pribadi mereka. Atau kemungkinan *kedua*, alasan utama keterlibatan mereka (jemaat) pada pesta demokrasi (pilkada) 2015 kemarin adalah untuk memperjuangkan kepentingan serta kesejahteraan bersama. Jemaat GPM Bethel Dobo ada di bagian mana? Apakah keterlibatan warga jemaat dalam proses pilkada kemarin hanya untuk kepentingan orang Kristen saja, ataukah motivasi keterlibatan mereka (jemaat) adalah untuk memperjuangkan kepentingan bersama seluruh ciptaan yang ada di bumi. Persoalan ini yang kemudian akan lebih digali penulis dalam bab-bab selanjutnya.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian adalah untuk melihat sekaligus mencari tahu sejauh mana sikap dan keterlibatan jemaat GPM Bethel Dobo pada pesta demokrasi (Pilkada) Desember 2015 serta bagaimana mereka memahami keterlibatan ini dari sudut pandang Kristiani. Dengan demikian maka berbagai data dan informasi yang akan penulis dapatkan dalam penelitian ini, kiranya dapat membantu penulis dalam proses penulisan skripsi. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Menumbuhkan kesadaran gereja dalam memahami makna kehadirannya di tengah kompleksitas persoalan sosial politik jemaat
2. Memberikan pemahaman kepada jemaat akan makna demokrasi menurut perspektif Kristiani
3. Memberikan pemahaman yang tepat kepada jemaat tentang bagaimana seharusnya seorang Kristen menyadari keterlibatannya dalam proses demokrasi
4. Mengevaluasi jalannya Pilkada di jemaat GPM Bethel Dobo untuk melihat sejauh mana jemaat memaknai partisipasinya dalam proses ini

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui wawancara secara mendalam kepada sejumlah responden guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Kumar membagi proses penelitian menjadi 8 langkah utama yang mesti dilakukan oleh seorang peniliti yaitu 1) Merumuskan apa yang menjadi masalah penelitian, 2) Menyusun desain penelitian. 3) Membuat alat pengumpulan data, 4) Menentukan sampel penelitian 5) Menulis proposal penelitian, 6) Mengumpulkan data, 7) Mengolah data dan 8)

Menulis laporan penelitian.¹⁶ Delapan langkah penelitian menurut Kumar inilah yang nantinya menuntun penulis dalam melakukan penelitian terkait pemahaman jemaat GPM Bethel Dobo akan makna demokrasi itu sendiri.

Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif ialah karena tujuan dari metode penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari sebuah fenomena atau situasi sekaligus mendapatkan deskripsi yang mendalam dari berbagai sumber atau opini terkait dengan situasi yang diteliti. Kemudian pada bagian selanjutnya, penulis akan melakukan evaluasi dengan melakukan analisa data terkait keterlibatan Jemaat GPM Bethel Dobo pada Pilkada Desember 2015 yang telah berlangsung dan mendiskusikannya dengan teori John Campbell Nelson tentang makna demokrasi menurut pemahaman Kristiani untuk mengetahui sejauh mana jemaat GPM Bethel Dobo memahami sebuah demokrasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini mencakup Latar belakang permasalahan, permasalahan dan pembatasan masalah, judul skripsi dan penjelasan pemilihan judul, tujuan dan alasan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka

Bab II Tinjauan Literatur: Paparan teori terkait pemahaman Kristiani tentang demokrasi

Dalam bab ini penulis akan memaparkan pandangan-pandangan para teolog tentang bagaimana sebuah sistem demokrasi dipahami dari sudut pandang Kristiani. Salah satu teori utama adalah pandangan John Campbell Nelson yang menjelaskan bagaimana demokrasi dipahami sebagai salah satu misi gereja. Dengan konsisten dan lugas Nelson mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem politik yang paling sesuai dengan iman Kristen. Khususnya pandangan

Kristen tentang manusia, koinonia, dan kuasa. Pandangan ini dapat menjadi sebuah landasan teologis bagi gereja sebagai sebuah lembaga dalam menjalankan misi pelayanannya di tengah dunia melalui segala aspek kehidupan dan juga sebagai landasan bagi jemaat dalam memahami panggilan dan kehadiran mereka sebagai warga jemaat dan warga negara.

¹⁶R. Kumar, *Research Methodology : A step by step guide for beginners* (London : Sage Publication, 2005), h 33

Dalam tulisannya juga Nelson memaparkan prinsip-prinsip dasar Alkitabiah serta relevansinya dengan persoalan demokrasi masa kini yang dapat dijadikan sebagai landasan teologis bagi orang Kristen dalam menghayati peran dan panggilan mereka di bidang politik. Uraian lebih jauh tentang teori ini akan penulis dalami dalam penulisan bab II.

Bab III Hasil Penelitian dan Paparan Konteks Jemaat GPM Bethel Dobo

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang memaparkan konteks GPM Bethel Dobo dimana penulis akan terlebih dahulu memaparkan penjelasan mengenai letak geografis Kabupaten Kepulauan Aru kemudian konteks masyarakat (jemaat) serta pekerjaan jemaat yang lebih dominan, kemudian memaparkan hasil penelitian mengenai respon jemaat terkait sikap dan keterlibatan mereka pada pesta demokrasi (pilkada) bulan Desember 2015.

Bab IV Analisis Teologis Terhadap Pemahaman Jemaat GPM Bethel Dobo Akan Makna Demokrasi Menurut Kaca Mata Iman Kristen

Bab ini berisi analisis teologis akan pemahaman jemaat tentang makna demokrasi melalui sikap dan keterlibatan mereka (jemaat) dalam mendukung jalannya Pilkada pada bulan Desember 2015. Analisis teologis ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan sekaligus menjembatani gagasan John Campbell Nelson tentang makna demokrasi menurut kacamata Kristiani serta pandangan-pandangan teolog lainnya tentang persoalan demokrasi yang sedang terjadi dengan realita di lapangan atau persoalan demokrasi yang terjadi di tengah konteks masyarakat/jemaat GPM Bethel Dobo melalui keikutsertaan mereka dalam aktivitas pilkada yang diselenggarakan di seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Kepulauan Aru khususnya pada bulan Desember 2015 untuk mengetahui sejauh mana jemaat GPM Bethel Dobo memahami makna demokrasi, mengingat sikap jemaat yang cukup antusias dalam mendukung jalannya salah satu agenda negara ini.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian kesimpulan dan saran penulis kepada GPM Bethel Dobo dalam menghayati panggilan dan pengutusannya di tengah dunia melalui kesediaannya untuk berjalan bersama warga jemaatnya di ladang demokrasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hal pertama dan utama yang muncul pada bagian akhir keseluruhan pembahasan ini yang mesti kita sadari ialah bahwa demokrasi sendiri merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang seperti apa? tujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan serta kedamaian bersama seluruh ciptaan di bumi. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam penerapannya, cara ini tentu tidak sepenuhnya sempurna. Sebab tidak ada cara yang tidak salah apalagi sempurna. Namun sebetulnya yang terpenting ialah bagaimana menggunakan cara yang jauh dari sempurna ini dengan cerdas dan bijaksana demi dan untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

Dari keseluruhan pemaparan akan sejauh mana sebuah konsep demokrasi dipahami dari sudut pandang atau kacamata iman Kristen, banyak hal menarik yang tentu dapat kita pelajari dari relasi kedua hal ini. Dengan keunikan masing-masing, tentu kedua hal ini yakni demokrasi dan nilai-nilai atau tradisi Kristiani saling melengkapi satu dengan lainnya. Kendatipun dalam penerapannya, perjalanan keduanya tidak selalu berjalan mulus. Tidak sedikit kita menjumpai dilema serius yang dirasakan oleh jemaat terkait bagaimana relasi kedua hal ini. Misalnya ketika kita menyadari bahwa Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri tanpa memandang suku, agama, status sosial atau apapun itu, namun dalam praktek demokrasi, kita justru membedakan orang berdasarkan suku, agama dan lain sebagainya. Kita bahkan menganggap orang yang tidak sesuku dengan kita sebagai orang asing bahkan kita cenderung mendiskriminasi mereka dan tidak menganggap kehadiran mereka dalam masyarakat. Kita mungkin lupa akan makna kehadiran kita kedalam dunia yakni untuk menghadirkan syalom bagi seuruh ciptaan, untuk memperjuangkan keadilan dalam gejolak ketidakadilan yang ada, dan untuk mewujudkan kasih bagi orang-orang yang tersingkir secara sosial, dan dengan berpegang pada teladan Yesus, kita dituntut untuk mengasihi sesama bahkan kepada orang yang kita anggap sebagai musuh sekalipun. Dengan demikian maka poin utama dari demokrasi dan iman Kristen adalah sama-sama memiliki misi untuk menghadirkan syalom kerajaan Allah kepada seluruh ciptaan yang ada di bumi. Poin ini yang belum sepenuhnya dihidupi dan direalisasikan melalui “pergaulan” Kristen dengan dunia politik dalam hal ini sistem demokrasi. Oleh karena dilema

inilah maka penjelasan akan relevansi atau implikasi nilai-nilai Kristiani terhadap kehidupan demokrasi seperti yang telah penulis paparkan dalam bab 4, sekiranya dapat memperkaya serta menjembatani pemahaman yang keliru akan makna demokrasi itu sendiri.

Dalam penerapannya di lapangan, sebuah sistem demokrasi tentu tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu selain demokrasi membutuhkan partisipasi rakyat sebagai subjek utama, demokrasi juga membutuhkan instansi lain dalam membimbing dan mengarahkan rakyat supaya rakyat tidak hanya ikut-ikutan dan sekadar menunjukan bahwa mereka berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas politik saja, melainkan partisipasi itu didasari dengan kesadaran dan pemahaman yang cukup akan makna demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu gereja sebagai sebuah lembaga dalam masyarakat, memiliki peran serta andil penting dalam hal mengarahkan warga jemaatnya kepada pemahaman yang benar akan persoalan ini. Tradisi-tradisi Kristen yang diwarisi oleh gereja selama ini kemudian tidak hanya menjadi sebuah konsep baku yang diam di dalam gereja saja, atau tidak hanya dikhotbahkan kepada jemaat dalam setiap ibadah Minggu saja, melainkan gereja perlu hadir langsung untuk memberikan pemahaman serta membimbing warga jemaatnya tentang bagaimana menghidupi serta mengaplikasikan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan oleh gereja ke dalam konteks persoalan yang tengah terjadi dalam masyarakat. Berkaca dari proses demokrasi yakni pemilihan kepala daerah yang terlaksana di Aru (Jemaat GPM Bethel Dobo) pada bulan Desember 2015 yang lalu, kehadiran gereja tentu sangat diperlukan. Tidak hanya untuk mengarahkan agar supaya proses berdemokrasi tetap berjalan damai, melainkan peran utama gereja adalah untuk mensosialisasikan nilai-nilai Kristiani yang terkandung dalam sebuah konsep demokrasi serta relasi dekat kedua hal ini kepada jemaatnya.

Disadari pula bahwa nilai-nilai atau tradisi-tradisi Kristiani memang bukanlah satu-satunya tolak ukur dalam menentukan sikap demokratis seseorang namun kesadaran untuk menghidupi tradisitradisi serta nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan bermasyarakat, dapat membentuk karakter seorang Kristen yang dewasa dalam menyikapi berbagai fenomena-fenomena sosial politik yang ada dalam masyarakat. Sebab orang yang memiliki karakter Kristen yang sesungguhnya tidak akan melakukan hal-hal yang berpotensi konflik, juga tidak akan melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas, juga tidak akan memperjuangkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan bersama. Itulah mengapa teologi-teologi Kristen atau teladan Yesus menjadi hal yang penting untuk dipahami, diteladani dan dihidupi dalam kehidupan sehari-hari warga jemaat GPM Bethel Dobo.

5.2 Saran

Melihat adanya kekeburan pemahaman warga jemaat GPM Bethel Dobo akan makna demokrasi serta sejauh mana ide akan persoalan demokrasi ini dipahami dari kacamata iman Kristen, maka penulis merasa agaknya gereja perlu menaruh perhatian serius dalam menangani apa yang menjadi pergumulan serta kebutuhan warga jemaatnya terkait dengan peran mereka (jemaat) dalam dunia politik. Pertanyaannya dengan cara yang seperti apa gereja menjalankan perannya dalam menjawab persoalan ini? Tentu gereja tidak perlu terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat seperti yang telah penulis tekankan pada bagian sebelumnya, gereja cukup melakukan bagiannya saja. Bagian yang bagaimana? Melalui setiap materi khotbah yang mendidik maksudnya mendidik ialah ide-ide dalam khotbah kepada jemaat tidak melulu tentang keselamatan di surga atau kerajaan Allah atau hal-hal abstrak lainnya, bahan khotbah bisa dikemas menjadi lebih kontekstual dalam artian lebih menyentuh realita atau persoalan demokrasi yang tengah digumuli oleh jemaat sendiri. Atau selain melalui materi khotbah setiap Minggu, juga melalui materi-materi pendalaman Alkitab kepada jemaat di setiap sektor-sektor atau unit-unit pelayanan, atau tema-tema khotbah yang berisi akan pengetahuan umum terkait relasi iman Kristen dengan persoalan demokrasi yang dapat menjadi bahak khotbah dalam ibadah-ibadah pemuda, wadah pelayanan perempuan/laki-laki dan bahkan materi-materi pengajaran Sekolah Minggu sesuai porsi bagi anak usia remaja. Selain itu, gereja juga bisa memanfaatkan moment persidangan jemaat sebagai sarana dalam menyusun program-program atau materi-materi pembinaan kepada jemaat terkait pendidikan politik dalam hal ini persoalan demokrasi yang senantiasa dihadapi dan hadir mewarnai kehidupan bergereja, berjemaat dan bermasyarakat. Sehingga bukan hanya urusan keuangan gereja saja yang menjadi topik pembahasan utama dalam agenda persidangan, melainkan masalah-masalah sosial politik jemaat juga mestinya mendapat posisi penting untuk didiskusikan secara serius dalam persidangan jemaat. Sebab dengan memperhatikan dan melakukan hal ini maka gereja kemudian menjadi gereja yang mendidik, memotivasi dan gereja yang bertumbuh bersama jemaatnya dan bukan gereja yang pasif.

DAFTAR PUSTAKA

- Camic, C. dkk (ed). 2005. *Max Weber's Economy and Society: A Critical Companion*. California : Stanford Unicersity Press
- Dules, Avery. 1990. *Model-Model Gereja*. NTT : Nusa Indah
- Kartodijro, Sartono, dkk. 1992. *DEMOKRASI, Gema Duta wacana*, no 44
- Kumar, R. 2005. *Research Methodology : A step by step guide for beginners*. London : Sage Publication
- Leks, Stefan. 2003. *Tafsir Injil Lukas*. Yogyakarta : Kanisius
- Nelson, J. C. 2013. *Teologi Politik*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Panjaitan, Merphin. 2013. *Logika Demokrasi*. Jakarta : Permata Aksara
- Puasa, Anselmus. 2014. *Yesus Ikut Pilkada*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius
- Romli, Lili. 2007. *Democracy Pilkada*. Jakarta: LIPI
- Stott, John. 2007. *The Living Church*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Yewangoe, A. 2009. *Tidak Ada Negara Agama*. Jakarta : BPK Gunung Mulia
- 2009. *Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Bangsa*. Jakarta: BPK Gunung Mulia

Website dan Sumber Data yang Lain

[http://irwanto.info/gambaran-umum-kabupaten-kepulauan-aru/](http://irwanto.info/gambaran-umum-kabupaten-kepulauan-ar/), diunduh tanggal 18 Mei

www.recisydney.org/2013/05/gereja-bukanlah-gedungnya, 27 Juni 2016

Data potensi perikanan DKP Kab Kep Aru 2014

BPS Kab Kep Aru 2014

Sumber: RTRW Kab. Kepulauan Aru, 2012

© UKDW